



PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI STRATEGI MENGATASI TANTANGAN KEBANGSAAN

Oleh

I Ketut Tanu¹, I Nengah Juliawan²

¹Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia

²STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia

¹ketuttanu@gmail.com, ²camebinkjulian@gmail.com

diterima 12 Juni 2020, direvisi 11 Juli 2020, diterbitkan 31 Agustus 2020

Abstract

Education is an orderly system and has a fairly broad mission, namely everything that is related to physical development, health, skills, thoughts, feelings, wills, social to issues of belief or faith. This shows that school as a formal educational institution has a heavy load in carrying out the educational mission. This is especially so if it is related to the rapid changes of the times these days which greatly affect students in thinking, behaving and behaving, especially those who are still in a stage of development in transition who are looking for self-identity.

In terms of character education, the Indonesian nation really needs large and quality human resources (human resources) to support the implementation of development programs properly. This is where quality education is needed, which can support the achievement of the nation's ideals of having quality resources, and in discussing quality human resources and their relationship with education, what is assessed first is how high the value it often gets, in other words quality. measured by numbers, so it is not surprising that in order to pursue the targets set by an educational institution, it sometimes commits fraud and manipulation.

Keywords: *Quality Improvement; Character building; National Challenge*

I. PENDAHULUAN

Wacana tentang pendidikan sebagai humanisasi atau pemanusiaan manusia agar ideal, akhir-akhir ini sering mengemuka pada ruang publik. Ada beberapa idea yang banyak disoroti, yakni kebutuhan mendesak untuk memperbaiki citra bangsa Indonesia yang

carut-marut. Muncul ide untuk melakukan revitalisasi terhadap mata ajar yang berkontribusi bagi pemanusiaan manusia, misalnya pendidikan agama, pendidikan IPS, dan lain-lain. Ide revitalisasi memunculkan pula gagasan mata ajar berlabel baru, kemasan baru atau label lama isinya

diperbaharui, misalnya pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai, pendidikan multikultur, pendidikan lintaskultur, pendidikan karakter bangsa pendidikan pancasila, dll.

Ada pula usulan agar memasukkan tradisi lisan sebagai salah satu bahan ajar untuk pengembangan karakter bangsa. Kearifan lokal dalam tradisi lisan diyakini dapat kembali menyadarkan pentingnya kehidupan multikultur. Sebab, tradisi lisan sebagai warisan budaya tampak sangat kaya akan kearifan sosial dan kearifan ekologis yang mempedomani manusia agar mewujudkan harmoni sosial dan harmonis ekologi. Tradisi lisan membantu peserta didik, terutama di usia dini, mengembangkan mimpi dan karakter mereka saat dewasa. Wacana tersebut secara kausalitas tentu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berlatar belakang sosiokultural.

Kemunculan gagasan pendidikan karakter berkaitan dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan berpegang pada asas *rwa bhineda* tantangan tidak saja berdampak positif atau sesuai dengan yang diidealkan, tetapi bisa pula berdampak negatif atau tidak bersesuaian dengan cita-cita ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dampak yang tidak diinginkan bisa mengakibatkan bangsa Indonesia carut-marut. Magnis-Suseno (2008) menunjukkan, ada empat tantangan terhadap perasaan kebangsaan, termasuk di dalamnya karakter bangsa Indonesia, yakni: (1) globalisasi; (2) egoisme dan kepicikan perasaan kedaerahan; (3) budaya konsumerisme dan hedonisme; dan (4) ideologi-ideologi totaliter.

Atmaja (2010) menunjukkan, bahwa globalisasi adalah proses menjadi menggelobal sehingga negara-negara di dunia seolah-olah menjadi satu, yakni kampung global. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain (Jatmika, 2010). Globalisasi dalam bidang ekonomi yang paling menonjol antara lain berwujud ekspansi penanaman modal lintas negara, baik

yang dilakukan secara langsung maupun bekerja sama dengan pengusaha lokal. Globalisasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari bidang lain, misalnya bidang budaya, sebagaimana tercermin pada seni kuliner makanan cepat saji yang mendunia, yakni *MacDonald's*, *Coca-cola*, dll. Begitu pula apel produksi Amerika Serikat, Australia atau New Zealand secara mudah bisa dibeli pada pasar-pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, termasuk Bali. Amerika Serikat adalah negara paling terkemuka pada kampung global yang sekaligus berarti budaya Amerika Serikat acap kali dipakai sebagai acuan bagi budaya dunia, terutama negara-negara di dunia mengalami apa yang disebut Amerikaisasi, *MacDonaldisasi* atau *coca-calaisasi*. *MacDonald's* dan *Coca-cola* adalah budaya Amerika Serikat sehingga proses menjadikan masyarakat dunia berbudaya Amerika Serikat disebut *MacDonaldisasi* atau *Coca-colaisasi*.

Amerikaisasi merupakan tantangan bagi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan lokal. Misalnya, pelebagaan bahasa Inggris sebagai bahasa global melalui pendidikan, disatu sisi sangat bermanfaat, bahkan bisa dialihkan menjadi model ekonomi. Namun disisi lain bisa menggerus perasaan kebangsaan-mendesak pemakaian bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. *MacDonaldisasi* dan *Coca-colanisasi* memunculkan tantangan, yakni di satu sisi manusia bisa mngonsumsi sesuatu secara instan dan bisa menikmati gaya hidup ala Barat sehingga menimbulkan kebanggaan semu. Namun disisi yang lain muncul penjajahan gaya baru, yakni imperialisme budaya termasuk di dalamnya imperialisme perut.

Betapa hebatnya imperialisme perut bisa dilihat pada generasi muda kelas menengah ke atas, semakin terbiasa mengonsumsi *MacDonald's* dan *Coca-cola* sehingga secara perlahan-lahan dapat memunculkan keterdesakan pada seni kuliner tradisional. Konsumen serangga semakin kecil karena ketidaksesuaian dengan selera budaya dan nilai simbolik maupun karena pertimbangan ekonomis.

Bangsa Indonesia mengalami egoisme dan kepicikan perasaan kedaerahan atau etnisitas. Hal ini sejalan dengan kondisi bangsa Indonesia bercorak multikultur (multietnik, multiagama). Setiap etnik memiliki kultur, bahkan wilayah tersendiri yang diidentifikasi sebagai teritorialnya. Otonomi daerah lebih mengukuhkan perasaan kedaerahan sehingga melahirkan hiperotonomi, yakni otonomi berlebihan yang representasinya terlihat pada perasaan keetnisitasan atau kedaerahan yang semakin kental. Akibatnya jabatan pada struktur birokrasi, sumber daya alam, peluang kerja dan lain-lain, hanya diruntukan bagi etnik daya alam, peluang kerja dan lain-lain, hanya diperuntukkan bagi etnik sendiri atau orang kita. Sebaiknya, etnik lain, bukan orang kita atau mereka adalah orang luar yang harus donomorduakan dalam menikmati apa yang menjadi milik kita. Perasaan seperti bisa menimbulkan masalah, jika penomorduuan berlanjut dengan marginalisasi, tindakan meliyan-kan atau men-the other-kan etnik atau orang yang dimerekakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tindakan marginalisasi atau meliyan-kan orang (etnik) lain dapat melahirkan kekerasan, yakni kekerasan ekonomi, budaya dan atau kekerasan fisik, baik secara individual maupun kolektif (Atmaja, 2010).

Gerakan *Ajeg* Bali pada masyarakat Bali merupakan kasus menarik dilihat dari segi politik identitas kesukubangsaan. Gerakan ini memiliki latar belakang yang terkait dengan keinginan memperkuat identitas kebudayaan Bali guna melawan kuatnya pengaruh kebudayaan global, yakni ideologi pasar atau agama pasar. Ideologi pasar merupakan seperangkat gagasan yang melihat pasar sebagai sumber kesejahteraan sehingga manusia bergantung pada pasar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam rangka menumbuh kembangkan pasar maka hakikat manusia sebagai *homo consumer* sengaja dipupuk dan dikembangkan sehingga melahirkan budaya konsumen atau masyarakat konsumsi. Kesemuanya ini tidak bisa dilepaskan dari hedonisme, yakni manusia yang selalu mengejar kenikmatan atau takluk

pada *kama*, hasrat atau keinginan. *Kama* secara mudah dikembangbiakan yang sekaligus berarti hedonisme secara gampang menjebak manusia. Sebab, menurut psikoanalisis atau filsafat Vedanta (agama Hindu), manusia pada hakikatnya adalah pabrik hasrat berjalan sehingga rangsangan pasar akan barang dan/atau jasa yang berlimah secara mudah mendorong mereka untuk terus memproduksi hasrat yang sekaligus berarti kegiatan mengkonsumsi tidak pernah berakhir pada manusia (Atmaja, 2010).

Dalam rangka menyalurkan, memupuk dan mengembangkan hasrat, maka dibentuk istana belanja, yakni hipermarket, *mall*, supermarket beserta anak cucu atau keturunannya, yakni mini market, toserba, dan waserda. Istana belanja ini tidak saja berkembang di kota, tetapi menjalar pula ke desa-desa. Begitu pula arena pelampiasan. Hasrat yang akhir-akhir ini banyak disoroti pada masyarakat Bali, yakni cafe semakin menggejala dan menyebar secara luas. Cafe yang berarti tempat orang bersantai sambil minum-minum dan mengobrol guna melenyapkan kepenatan sebagai representasi budaya Barat yang semula berdiri di perkotaan, dibuat tiruannya dan disebarakan sampai ke pelosok desa sehingga Bali mengalami cafeisasi secara luar biasa. Akibatnya, Bali yang semula dikenal dengan label Pulau Seribu Pura, mendapatkan label baru, yakni Pulau Seribu Cafe.

Pendek kata, apa pun bentuk ruang belanja hipermarket dan anak cucunya, begitu pula cafe dan yang lainnya yang tersebar ke pelosok desa, pada dasarnya merupakan arena bagi manusia untuk melampiasakan substansinya sebagai *homo consumer* yang berlanjut pada pembentukan manusia hedonik. Namun, dibalik kesemuanya itu maka sasaran akhir yang dituju adalah menjadikan manusia sebagai makhluk serakah. Keserakahan merupakan persyaratan utama bagi keberlangsungan hidup pasar akan lenyap yang sekaligus berarti kelangsungan hidup negara-negara kapitalis akan selalu berusaha membujuk negara-negara di dunia. Agar memberikan dukungannya lewat pembukaan pasar yang luas-luasnya.

Keserakahan sebagai akibat dari adanya konsumerisme dan hedonisme membentuk pula perubahan citra manusia tentang lingkungan alam. Menurut Atmaja (1998) manusia Bali misalnya, semula melihat lingkungan alam adalah bagian dari dirinya – etika lingkungan holistik sehingga merusak lingkungan berarti merusak dirinya sendiri. Namun, karena manusia serakah maka lingkungan alam dianggap sebagai objek yang harus dieksploitasi untuk memenuhi keinginan manusia sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah.

Tantangan lainnya adalah ideologi-ideologi totaliter, baik ideologi sekuler maupun agamis. Ideologi agamis acap kali muncul sebagai respon atas dampak yang tidak diinginkan dari adanya globalisasi atau Amerikanisasi dan atau kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kelompok-kelompok terpinggirkan sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih terpinggirkan lagi. Dalam kondisi seperti ini muncul kelompok-kelompok fundamentalisme yang menempatkan dirinya sebagai sekumpulan orang yang memiliki kebenaran mutlak. Orang lain harus menerimanya dengan penuh ketaatan. Setiap orang yang menolak harus disingkirkan, baik secara halus maupun dengan kekerasan. Berkenaan dengan itu tidak mengherankan jika kaum fundamentalis agamis-berlaku pula pada fundamenlissekuler secara mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang menolak kebenaran yang ditawarkannya (Magnis-suseno, 2008).

Keempat tantangan tersebut memunculkan masalah bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia-tanpa mengabaikan dampak positifnya. Sebagaimana yang disaksikan pada TV atau berita ada surat kabar, aca kali kita tidak mengenali lagi wajah bangsa Indonesia yang sebenarnya-lazim dianggap bangsa yang ramah, sopan, sabar dan pengidealisasian yang lainnya. Misalnya, gaya hidup orang Indonesia semakin sulit dibedakan dengan gaya hidup orang Barat-paling tidak di kota-kota besar, bahkan merembes pula ke desa. Dalam kehidupan berbangsa orang Indonesia yang semestinya memposisikan dirinya memberikan sesuatu

untuk kejayaan negaranya, namun karena kuatnya konsumerisme dan hedonisme, maka banyak orang bukannya memberi, melainkan selalu meminta atau bahkan menguras dari negara sehingga korupsi sulit diberantas-korupsi penyakit kronis.

Gagasan ini dapat dibandingkan dengan paparan Suyanto (2010) bahwa pendidikan karakter sangat mendesak, dengan alasan, *pertama*, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofis dan ideologi bangsa. *Kedua*, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. *Ketiga*, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, memudarkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. *Kelima*, ancaman disintegrasi bangsa. *Keenam*, melemahnya kemandirian bangsa.

Dengan adanya kenyataan ini tidak mengherankan jika bangsa Indonesia yang terkenal santun dan taat pada agama, dan setiap agama mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan kasih sayang, realitasnya bertolak belakang. Orang Indonesia mudah beringas yang berujung pada tindakan kekerasan. Bangsa Indonesia sangat terkenal memiliki toleransi tinggi atas dasar agama dan/atau etnisitas, realitasnya berubah menjadi manusia yang intoleransi. Hal ini tercermin dari konflik-konflik sosial yang di dalamnya bisa melibatkan faktor etnisitas dan/atau agama-sengaja dimasukkan guna menumbuhkan solidaritas agar bisa mengalahkan lawan. Betapa meluasnya keberingasan, kekerasan dan konflik yang bermotif perebutan akses ekonomi atau berlatarkan ogoisme kesukubangsaan (sukuisme), kedaerahan (daerahisme) atau kelompok (kolompokisme) secara mudah bisa disaksikan melalui tayangan TV. Begitu pula gerakan fundamentalisme agama, jika direpresentasikan sebatas wacana dan atau pencapaian sasarannya dilakukan dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bernegara-cara-cara demokratis, tindakan menimbulkan ancaman bagi kehidupan berbangsa. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yakni pencaaian

tujuan dilakukan secara kekerasan berwujud terorisme, maka sendi-sendi kehidupan NKRI yang berlandaskan ideologi Pancasila secara otomatis mengalami ancaman yang serius.

Wajah bangsa Indonesia sulit dikenal terlihat pada kasus masyarakat Bali, Menurut Atmadja (2010) dalam bukunya berjudul “*Ajeg Bali : Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*”, wajah kebudayaan Bali tidak lagi sama dengan keadaan kebudayaan Bali pada tahun 1950-an, misalnya Bali sebagai Pulau Dewata telah berubah menjadi Bali Pulau Denawa (Raksasa). Bali Pulau Surga Terakhir bisa jadi akan berubah menjadi Bali Pulau Surga (yang) Berakhir. Bali sebagai Pulau Seribu Pura berubah menjadi Bali sebagai Pulau Seribu Masalah dan Pulau Seribu Cafe.

Perubahan label ini secara mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bali sebagai Pulau Surga, karena kebudayaannya yang menawan dan kehidupan masyarakatnya yang damai, akhir-akhir ini mulai goyah, tercermin dari adanya konflik antasesama orang Bali. Konflik bisa berlatarkan egoisme *banjar*, *desa pakraman*, *dadia*, dll. Belum terhitung lagi adanya intoleransi sehingga orang Bali secara mudah me-*liyan*-kan etnik lain yang bermukim di Bali melalui kekerasan bahasa, ekonomi, bahkan bisa mengarah kepada kekerasan fisik, baik secara individual maupun kolektif. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, semakin banyak orang Bali melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya (Atmadja, 2016).

Dengan demikian tidak berlebihan jika disimpulkan, bahwa semakin lama wajah keindonesiaan bangsa Indonesia, begitu pula wajah kebalikan Orang Bali, semakin sulit dikenal seperti yang disaksikan pada ruang publik atau tayangan TV-korupsi membudaya dan kekerasan dipakai sebagai alat mencapai tujuan. Dalam kondisi seperti ini luhulima (2010:72) terheran-heran mempertahankan “...benarkan bangsa pendidikan telah menempatkan peserta didik hanya sebagai *homo faber* dalam konteks *homo economicus*. Sebaliknya, mereka mengabaikan hakikat manusia sebagai *homo complexus*, yakni manusia yang memiliki dimensi yang

kompleks sebagai implikasi dan tubuh yang meroh atau roh yang menubuh – dualisme sebagai satu kesatuan yang holistik (Drijakara, 1985). Mata pelajaran lain yang semestinya bisa mengimbangi hakikat manusia sebagai *homo economicus*, yakni ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan (humaniora) kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi ini mengakibatkan, meminjam gagasan Keraf (2002) terbentuk manusia yang menganut paradigma etika antroposenterisme, bukan paradigma holistik atau meminjam Robbins dan Judge (2008) budaya kolektif berubah menjadi budaya individualistik sehingga manusia menjadi egois, serakah atau lebih mengutamakan keakuan, kesayangan atau kekelompokan, bukan kekitaan atau orang lain. Dalam rangka memulihkan wajah keindonesiaan yang carut-marut maka ada berbagai tawaran resep pendidikan yang mengemuka antara lain pendidikan karakter.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka, dimana peneliti tidak hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur saja, tetapi peneliti memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti literatur yaitu harus memperhatikan metode penelitian untuk mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dimiliki dan disiapkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter mengacu kepada usaha untuk membentuk karakter manusia. Menurut Suyanto (2010:46) karakter adalah sebagai berikut.

Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terewantahkan dalam perilaku. Karakter secara hinheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa. Serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau

sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Suyanto, 2010:46).

Pendidikan karakter dilakukan kepada seseorang dengan melibatkan subjek pembentuk karakter-agen pendidikan dan peserta didik sebagai pembelajar. Namun, bagaimanapun juga sasarannya adalah membentuk karakter bangsa.

Karakter bangsa adalah perilaku kolektif kebangsaan yang unik-unik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-balik norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Suyanto, 2010:46-47).

Dengan demikian pendidikan karakter bangsa adalah mengindonesiakan orang Indonesia atau proses Indonesiaisasi agar melahirkan manusia Indonesia yang betul-betul berkepribadian Indonesia yang tercermin pada dasar negara Pancasila.

Dalam persektif teori kebudayaan dan teori kepribadian yang dikemukakan Robbins dan Judge (2008) mengindonesiakan manusia Indonesia terkait dengan sistem nilai. Nilai dijabarkan ke dalam norma dan keduanya berkaitan dengan ideologi, yakni Pancasila (Tilaar, 2002; Surakhmad, 2009; Sularto, 2010; Asra, 2010; Magnis-Suseno, 2010). Betapa pentingnya ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dicermati pendapat Asra (2010:11) sebagai berikut.

Pada hemat saya, Pancasila telah terbukti sebagai garis haluan bersama ideologi negara-negara Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih *viable* bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Saya tetap tidak melihat adanya alternatif garis haluan bersama ideologi lain, yang tidak hanya aseptabel bagi warga bangsa, tetapi juga dapat terus hidup dalam perjalanan negara-negara Indonesia ke depan (Azra, 2010:11).

Begitu pula Said (1980) mengatakan Pancasila harus diterima, tidak hanya karena nilai kesejahteraannya, tetapi juga karena Pancasila merupakan sumber norma etika yang rasional bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan karakter Indonesia bisa pula disebut memancasilakan (Pancasila-isasi) terhadap manusia Indonesia guna membentuk manusia Indonesia berkepribadian Pancasila. Hal ini mencakup kognisi, afeksi dan psikomotorik yang teraktualisasi pada kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakter bangsa amat penting mengingat "...karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Tim Penyusun, 2010:7). Ciri khas dan unik yang membedakannya dari karakter bangsa lain merupakan representasi dari superstruktur ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945 beserta tata aturan lain sebagai turunannya.

Indikator manusia Indonesia berkarakter keindonesiaan orang Indonesia yang berkepribadian Pancasila, harus menerima pluralitas sebagai suatu berkah bukan musibah. Hal ini tidak bisa dileaskan dari corak masyarakat Indonesia yang bersifat multikultur. Penerimaan terhadap pluralitas tidak saja secara kognisi, tetapi juga mempraksis, yakni memperlakukan orang lain yang berbeda agama, sukubangsa, kebudayaan, kedaerahan dan aspek-aspek lainnya secara berkesetaraan dan berkeadilan atau tanpa diskriminasi. *Kedua*, demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia yang bersifat multikultur, sebab "...Negara yang semajemuk Indonesia tidak bisa dipersatukan dengan paksaan. Indonesia hanya akan tetap bersatu apabila semua komponen bangsa mau bersatu dan mereka hanya akan mau bersatu apabila mereka dapat ikut mengurusnya.

Itulah yang dijamin oleh demokrasi” (Magnis-Suseno, 2008:30). *Ketiga*, keadilan sosial. Keadilan sosial tercermin pada berbagai aspek kehidupan terutama terkait dengan penciptaan suatu ruang sosial di mana orang Indonesia bisa hidup sebagai manusia yang seutuhnya-bisa mengaktualisasikan diri secara optimal sebagai manusia Indonesia. Hal ini sangat penting guna mewujudkan solidaritas bangsa. Tanpa keadilan sosial, keutuhan NKRI atau integrasi sosial dalam masyarakat sulit diwujudkan, bahkan berubah menjadi konflik, mulai dari konflik *latent*, sampai kepada konflik *over* dengan kekerasan.

Gagasan lain tentang pendidikan karakter dapat pula dicermati gagasan Megawangi (dalam Elmubarok, 2009). Dia mengatakan bahwa pendidikan karakter secara ideal bertumpu pada sembilan pilar.

- a. Cinta Tuhan dan kebenaran (love Allah, trust, reverence, loyalty)
- b. Tanggungjawab kedisiplinan, dan kemandirian (*responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*)
- c. Amanah dan santun (*respect, courtesy, obedience*)
- d. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*)
- e. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (*love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*)
- f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*)
- g. Keadilan dan kepemimpinan (*justice, fairness, mercy, leadership*)
- h. Baik dan rendah hati (*kindness, flexibility, peacefulness, unity*) (Megawangi dalam Elmubarok, 2009:111-112).

Walaupun gagasan ini tidak secara spesifik mengacu kepada karakter kepancasilaan, namun secara maknawiah tidak jauh berbeda daripada nilai-nilai, namun

secara maknawiah tidak jauh berbeda daripada nilai-nilai Pancasila. Gagasan ini sesuai dan/atau dapat diaplikasikan guna menata realitas bangsa Indonesia bercorak multikultur. Pengaktualisasian karakter ini diposisikan sebagai representasi dari hakikat manusia Indonesia sebagai insan Pancasila.

2. Pendekatan dan Model Pembelajaran

Sekolah merupakan salah satu agen pendidikan karakter bangsa yang sangat penting. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari hakikat sekolah sebagai lembaga yang sengaja dibentuk oleh negara-bisa pula lembaga swasta atas izin negara, dengan tujuan mereproduksi manusia guna mewujudkan citra manusia yang ideal. Dengan berpegang ada gagasan Tim penyusun Pengembangan Karakter di Perguruan Tinggi (2010) pendidikan karakter bangsa membutuhkan pendekatan. Adapun pendekatannya, antara lain sebagai berikut.

- a. Pendekatan keteladanan. Penanaman nilai-nilai karakter keindonesiaan atau kepribadian Pancasila tidak hanya lewat omongan atau ajakan, tetapi yang lebih penting adalah melalui pemodelan atau contoh-contoh nyata. Misalnya, pemodelan dilakukan oleh guru, Kepala Sekolah, dll. Pemodelan bisa lebih berhasil, tidak saja karena empiri, tetapi juga karena budaya Indonesia bersifat paternalistik atau karena budaya Indonesia bersifat paternalistik atau bapakisme.
- b. Pendekatan berbasis kelas. Penanaman nilai-nilai karakter bangsa dilakukan lewat pembelajaran di kelas. Pendekatan ini tidak mesti melahirkan metapelajaran tersendiri, melainkan bisa memakai pendekatan integrasi pembelajaran. Artinya, pencapaian nilai-nilai karakter bangsa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan-digandengkan pada kompetensi IPS, Sosiologi, Pendidikan Kewarganegaraan, dll. Guru mata ajar yang bersangkutan sangat menentukan keberlangsungan pendekatan

- penanaman nilai-nilai karakter bangsa berbasis kelas.
- c. Pendekatan integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pencapaian nilai-nilai karakter bangsa bisa pula diintegrasikan dengan kegiatan yang ditangani oleh OSIS. Untuk itu, staf pengurus OSIS, guru pembimbing OSIS, Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya berperan penting dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada penanaman nilai-nilai karakter bangsa berbasiskan ideologi Pancasila.
 - d. Pendekatan pengembangan kultur sekolah. Artinya, sekolah mengembangkan budaya sekolah yang mencerminkan dan memperkuat penanaman nilai-nilai karakter bangsa. Kepala sekolah dan lembaga yang terkait, misalnya Pemkab dan jajaran berperan sangat penting.
 - e. Pendekatan pendidikan karakter berbasis komunitas. Pendekatan ini bisa berwujud mengajak siswa untuk belajar tentang bagaimana suatu komunitas, misalnya yang bercorak multiagama dan atau multietnik mempraktikkan nilai-nilai pendidikan karakter-toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, komunitas adalah laboratorium bagi peserta didik guna memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumberkan pada ideologi Pancasila.
- Pendekatan pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari model pembelajaran, Namun, apa pun model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan karakter bangsa, ada beberapa yang digunakan dalam pendidikan karakter bangsa, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yakni:
- a. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai dan model tidak bisa dibelajarkan hanya dengan pendekatan nilai-nilai atau kebenaran dan kewajiban belum tentu menghayati dan melaksanakannya. Dia baru melaksanakannya jika nilai-nilai yang ditanamkan terinternalisasikan secara mantap pada peserta didik.
 - b. Pendidikan karakter yang terfokus pada penanaman nilai membutuhkan perumusan secara lebih untuk dan bermakna yang mengintegrasikan segi-segi konsep pengetahuan, nilai-nilai, sikap, norma dan keputusan moral. Kesemuanya ini tidak bisa hanya bersifat kognisi, melainkan bermuara atau teraktualisasi dalam ketrampilan sosial yang tercermin pada tindakan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. Pendidikan karakter bangsa merupakan rangkaian kegiatan bersinergi, yakni mengetahui nilai-nilai, belajar mempertimbangkan nilai-nilai, belajar membuat keputusan atas nilai, dan belajar membiasakan diri bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai. Kontrol sosial internal dan eksternal tidak bisa diabaikan dalam konteks pelebagaan nilai-nilai karakter bangsa.
 - d. Pendidikan nilai secara ideal menekankan ada gagasan pendidikan kritis. Artinya, dalam penanaman nilai-nilai karakter bangsa maka model pendidikan gaya bank tidak relevan. Sebagai gantinya, peserta didik diberikan peluang berpikir kritis mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter melalui kegiatan dekonstruksi dan rekonstruksi sehingga nilai-nilai yang ditanamkan, tidak berbentuk hapalan, tetapi karena dipahami secara kritis.
 - e. Pendidikan karakter tidak lagi hanya menekankan pada otak kiri-pengetahuan yang harus dihafal, tetapi menjangkau pula otak kanan-menekankan pada merasakan, menghayati dan mengubah perilaku. Dengan kata lain bisa pula dikemukakan pendidikan karakter dilakukan secara integral melibatkan aspek *knowing* (mengetahui), *acting* (melatih dan membiasakan) serta *feeling* (perasaan)

sehingga menghasilkan manusia-manusia pencinta kebajikan (Megawangi, 2007:59).

- f. Dengan mengacu kepada Russell William (dalam Megawangi, 2007) pendidikan karakter dapat diibaratkan sebagai “otot”, dimana “otot” karakter akan menjadi lembek apabila tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh kalau sering dipakai. Seperti halnya binarawan yang terus-menerus berlatih membentuk ototnya, maka “otot-otot” karakter juga akan terbentuk dengan praktik-praktik latihan yang akhirnya menjadi kebiasaan maka seseorang secara otomatis akan melaksanakan, jika tidak ia akan merasakan adanya kekurangan-kebiasaan makan nasi, jika tidak makan, misalnya jagung maka seseorang merasakan belum makan, sebab makan=nasi.
- g. Pananaman pendidikan karakter bangsa memerlukan penguatan dan dukungan dari berbagai pihak secara bersinergi. Penyelenggaraan pendidikan karakter tidak saja dilakukan oleh sekolah, tetapi juga agen-agen pendidikan lainnya secara bersinergi, yakni keluarga, masyarakat, media massa, teman sepermainan, dll. (Tim penyusun, 2010: 43-44).

Pendidikan karakter bangsa tidak saja membutuhkan pendekatan, tetapi juga model pembelajaran. Model pembelajaran pendidikan karakter bangsa, yakni: *pertama*, model pembelajaran penanaman nilai. Model ini berfokus pada aktivitas peserta didik, tidak saja diajak secara kritis menerima nilai-nilai baru-karakter keindonesiaan, tetapi juga memperkuat, menyesuaikan, mengadaptasikan atau bahkan merubah nilai-nilai lama-terutama karakter kesukubangsaan agar yang satu tidak berkontradisi dengan yang lainnya. *Kedua*, model pembelajaran berbasis perkembangan penalaran moral. Model ini menekankan pada pelibatan peserta didik secara rasional sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya. *Ketiga*, model pembelajaran analisis nilai. Model ini lebih menekankan pada aktivitas peserta didik

untuk menganalisis kandungan nilai-nilai yang bersifat konfliktual yang terjadi dalam masyarakat. Peserta didik diberikan kesempatan memosisikan dirinya secara argumentatif. *Keempat*, model pembelajaran klarifikasi nilai. Peserta didik diajak mengklarifikasi pilihan atas suatu nilai berdasarkan perspektif subjektifnya. *Kelima*, model pembelajaran *project citizen*. Model ini antara lain berbentuk suatu kegiatan mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi suatu masalah sosial atau kebutuhan suatu masyarakat, lalu menyusun berbagai alternatif projek pemecahan dan sekaligus mempraksiskannya. *Keenam*, model pembelajaran berbasis budaya spiritual. Model pembelajaran ini menekankan ada sinergi antara ilmu dan agama dalam memaknai dan memecahkan masalah-masalah sosial dan atau menanggulangi suatu kejadian guna mewujudkan masyarakat berkedamaian (Tim penyusun, 2010).

3. Pendidikan Karakter dan Era Postmodern

Gagasan di atas menunjukkan bahwa saat ini kita berada ada era globalisasi. Kondisi ini tidak saja mengakibatkan berbagai dampak, tetapi memunculkan pula sebutan baru bagi perubahan kebudayaan yang melanda masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yakni dari masyarakat modern berubah menjadi masyarakat postmodern. Dengan mengacu kepada gagasan Bachtra dan Saifuddin (2015) gejala ini mengakibatkan pendidikan karakter secara ideal sangat perlu mempertimbangkan pengadopsian berbagai paham sebagai berikut.

- a. *Post-antroposentric*. Pendidikan karakter mengarah kepada pembentukan manusia yang mampu mengolah sumber daya lama secara berkelanjutan. Hal ini penting, sebab globalisasi yang kental dengan konsumerisme mengakibatkan manusia serakah. Keserakahan tercermin pada pengeskploitasian lingkungan alam secara berlebihan. Kondisi ini menentukan penanggulangan lewat pendidikan

- karakter yang di dalamnya memasukkan paham *post-antropocentric*.
- b. *Post-competitive*. Pendidikan karakter mendidik bangsa agar menghormati bangsanya sendiri dan mempunyai hubungan yang saling menghormati dengan bangsa lain. Hal ini terkait dengan globalisasi yang mengakibatkan bangsa yang satu dan yang lainnya hidup dalam suatu kampung global.
 - c. *Post-patriarchal*. Pendidikan karakter mampu menyelesaikan konflik suatu bangsa dengan jalan damai bukan melalui jalan kekerasan.
 - d. *Post-patriarchal*. Pendidikan mampu menumbuhkembangkan sikap dan praktik sosial yang meposisi laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sederajat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pengajaran sejarah tidak lagi hanya menonjolkan pahlawan laki-laki, tetapi juga pahlawan perempuan.
 - e. *Post-scientific*. Mengajarkan peserta didik agar tidak saja mendalami ilmu, tetapi juga nilai-nilai Pancasila, agama, dan kearifan lokal sebagai modal budaya guna membentuk kemajuan bangsa yang holistik.
 - f. *Post-nationalistic*. Pendidikan karakter mengajarkan nasionalisme yang tidak hanya mementingkan bangsa sendiri, tetapi juga peduli terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Hal ini terkait dengan kehidupan manusia terikat pada lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Pendek kata, gagasan ini mencerminkan bahwa pendidikan karakter amat penting, tidak saja untuk memajukan bangsa dan negara, tetapi terkait pula dengan tujuan untuk mengatasi krisis kebangsaan sebagai akibat dari adanya globalisasi.

Khusus dalam kaitannya dengan *post-nationalistic* menarik dikemukakan pendapat Megawangi (2007) tentang jargon yang amat terkenal, yakni *right or wong, my country*. Jargon *right or wong my country – moto Britania Raya* dikemukakan oleh Jenderal Louis Mountbatten (Sudiarja, 2015:9) terkait dengan paham kebangsaan yang

memposisikan negara tidak pernah salah. Megawangi (2007) menunjukkan bahwa pemikiran seperti ini adalah negatif karena bisa mengarah kepada sifat *xenophobia*, yakni menganggap bangsanya adalah yang terbenar di dunia. Hal ini bisa memunculkan perilaku negara yang berujung pada sikap membabi buta untuk melakukan apa saja terhadap bangsa lain dan/atau komponen bangsa yang dianggap mencedraai kebenaran yang berpusat pada negara kita. Jika moto ini dipegang secara kaku bisa menimbulkan masalah apalagi pada era globalisasi negara-negara di dunia hidup dalam kampung global. Kedamaian sulit diwujudkan jika kita terjebak pada *xenophobia*.

Berkenaan dengan itu Megawangi (2007) menganjurkan agar nasionalisme yang sebaliknya dikembangkan bukan adalah nasionalisme positif bukan *right or wong, my country*. Wujud nasionalisme positif adalah menempatkan negara sebagai objek yang kita cintai adalah fakta keduniawian sehingga bisa salah bisa pula benar.

Menerima kekurangan atau memberikan kritik kepada objek yang kita cintai adalah manifestasi dari cinta yang berasal rasa kerendahatian, bukan dari rasa kebanggaan. Mencintai negara dengan ini adalah semangat nasionalisme positif sehingga dapat menimbulkan rasa empati dan menggerakkan hati untuk berbuat sesuatu kepada negara, menjaga kehormatan negara, dan mengkritiknya apabila negara salah. Kalau rasa nasionalisme negatif sering menimbulkan semangat patriotisme “ingin menang”, atau kemarahan apabila negara dikritik, semangat nasionalisme positif akan menimbulkan solidaritas persaudaraan murni (Megawangi, 2007:273).

Gagasan ini diperkuat Romo Mangunwijaya-Romo Mangun (dalam Sudiardja, 2015) yang menolak moto *right or wong, my country* karena mencerminkan chauvinisme atau *xenophobia*. Menurut Romo Mangun moto ini harus ditinggalkan lewat pembentukan manusia humanis atau Pasca-Indonesia, Pasca-Nasional atau Pasca-Einstein (Indratno, 2015:xii).

Konsep Pasca-Nasional mencita-citakan sosok manusia Indonesia yang terbuka kepada nilai-nilai kemanusiaan universal, meskipun tetap beregang kepala nilai-nilai keindonesiaan. Sedangkan, manusia Pasca-Einstein adalah sosok manusia yang bersikap menurut dinamika relativitas, dengan tidak main mutlak-mutlakan, karena segala sesuatu bersifat relatif. Generasi muda harus meluaskan horizonnya dengan berfikir kreatif, eksploratif, dan pluralistik. Hidup multidimensional (bermatra ganda). Jika satu jalan yang ditempuh gagal, orang wajib mencoba jalan lain. Artinya, hidup ini penuh dengan kemungkinan. Konsep Pasca-Einstein itu ditandai juga dengan paradigma berpikir nggiwar (berpikir *literal, literal thinking*) (Romo Mangunwijaya dalam Indratno, 2015:xii-xiii).

Apalagi dikaitkan dengan *post-nasionalistic* dan globalisasi sebagai keniscayaan maka keterbukaan dalam hubungan antarnegara merupakan suatu keharusan. Negara yang tidak pernah salah bagaimana tercermin pada moto *right or wrong my country* secara mudah bisa digunakan oleh pemerintah untuk menindas orang lain yang mengeritik pemerintah dan/atau negara dengan alasan negara-pemerintah adalah representasi negara sehingga presiden disebut Kepala Negara, sehingga mengeritik negara = mengeritik Kepala Negara = Presiden. Dengan demikian benar apa yang dikemukakan Megawangi dan Mangunwijaya yang perlu dikembangkan adalah nasionalisme positif, Pasca-Indonesia, Pasca-Nasional atau Pasca-Einstein. Negara dan/atau pemerintah bisa dikritik sebagai wujud kecintaan kita kepada negara. Dengan mengacu kepada gagasan agama Hindu tentu saja kritik harus proporsional-tidak asal mengeritik dengan berbasiskan pada *ahimsa*.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan karakter dilakukan kepada seseorang dengan melibatkan subjek pembentuk karakter-agen pendidikan dan peserta didik sebagai pembelajar. Namun, bagaimanapun juga sasarannya adalah membentuk karakter bangsa.

Karakter bangsa adalah perilaku kolektif kebangsaan yang unik-unik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-balik norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. M. (1983). *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algendindo.
- Ali, M., dkk., (1998). *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. Yogya : PT. Tiara Wacana..
- Azizy, A. Q. A. (2003). *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan : Pandai dan Bermamfaat)*. Semarang : CV. Aneka Ilmu.
- Daryanto. (1998). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djamarah, S. B. (2000). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gordon, T. (1986). *Guru Yang Efektif Cara Untuk Mengatasi Kesulitan Dalam Kelas*. Jakarta : CV. Radjawali.
- Idris, Z. (1981). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Padang : Angkasa Raya.
- Marland. (1990). *Seni Mengelola Kelas, Tugas dan Penampilan Seorang Pendidik*. Semarang : Dahara Prize.
- Maswinara, I W. (1998). *Ilmu Pengetahuan dan Spiritual Berdasarkan Veda*. Surabaya : Paramita.
- Maswinara, I W. (1999). *Sistem Filsafat Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Maswinara, I W. (2003). *Sistem Filsafat Hindu*. Surabaya : Paramita.
- MD Dahlan, S. Hamid Hasan. dan A. Moein Moesa. (1989). *Model-Model Mengajar*. IKIP Bandung-Pusdiklat Perumtel.

- Moelyono, D. (2004). *Beyond Leadership 12 Konsep Kepemimpinan*. Jakarta : Gramedia.
- Mudjijo. (1995). *Tes Hasil Belajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mudyahardjo, R. dan Waini Rasyidin. (1992). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Ditjen Bimas Hindu dan Buddha dan UT
- Nawawi. (1995). *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Purwanto, M. N. (1986). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Rochman, N. (1976). *Diagnostik Kesulitan Belajar*. Jakarta : BP3K.
- Roestiyah. (1986). *Metodik Didaktik*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Russell, B. (1993). *Pendidikan dan Tataan Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sadiman, dkk. (1986). *Media Pendidikan Penegrtian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Shochib, M. (1998). *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Subroto. (1984). *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Sudjana, N. dan Rivai, A. (2002). *Media Pengajaran*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Suhartin, RI. (1982). *Mengatasi Kesulitan-Kesulitan Belajar Dalam Pendidikan Anak*. Jakarta : BPK Gunung Agung.
- Sumarsono. (1986). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unud Singaraja.
- Sunarto dan B. Agung Hartono. (2002). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. (1982). *Perkembangan Individu*. CV. Rajawali.
- Surya M. & Amin, M. (1981). *Pengajaran Remedial*. Jakarta : Depdikbud.
- Suryosubroto, B. (1983). *Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutisna. (1987). *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung : Angkasa.
- Thera, V. N. M. (1980). *Orang Tua dan Anak*. Jakarta : Aksara Buddhis Mandiri.
- Titib, I M. (2003). *Purana Sumber Ajaran Hindu Komprehensif*, Jakarta : Mitra
- Titib, I M. (2003). *Menumbuhkembangkan Pendidikan Budhi Pekerti Pada Anak (Perspektif Agama Hindu)*. Bandung : Ganesa.
- Wragg, EC. (1996). *Pengelolaan Kelas*. Jakarta : PT. Gramedia.